

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Inklusif merupakan aspek penting dan hak dasar yang dapat diperoleh seluruh individu baik itu yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan UU Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 dijelaskan pula, tak terkecuali warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial maupun intelektual berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama.

Pendidikan Inklusi di Indonesia diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 yang selanjutnya diperkuat dalam Permendikbud No. 70/2009. Kebijakan ini menyatakan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dijalur dan jenjang yang dibutuhkan (Mukti et al., 2023).

Untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah penerapan pendidikan inklusif. Menurut Ratriani (2024) dalam penelitiannya inklusif sendiri sangat erat kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas (Arifa, 2024). Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar siswa berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak, salah satunya melalui sekolah inklusif.

Pentingnya pendidikan inklusif telah diakui secara luas dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Dengan menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan bagi semua individu, pendidikan inklusif membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pendidikan inklusif juga memberikan manfaat bagi siswa tanpa kebutuhan khusus, karena mereka dapat belajar tentang keragaman dan mengembangkan sikap empati dan pengertian terhadap individu yang berbeda-beda. Namun, penerapan kebijakan inklusi ini bukannya tanpa tantangan. Kurangnya kesiapan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif merupakan permasalahan penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dampaknya sangat terasa pada proses pembelajaran yang terkesan dipaksakan, dimana peserta didik mencapai hasil belajar yang kurang optimal (Leksmiani & Hanafi, 2024).

Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, setiap sekolah baik negeri maupun swasta wajib menjadi sekolah inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir penyelenggaraan sekolah inklusif mengalami peningkatan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan pada tahun 2021 sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus sebanyak 35.802 sekolah, tahun 2022 naik menjadi 40.928 sekolah, dan hingga September 2023 menjadi 44.477 sekolah. Saat ini terdapat 146.205 siswa berkebutuhan khusus di bangku sekolah inklusif yang tersebar di seluruh jenjang pendidikan. Sementara itu 152.756 siswa berkebutuhan khusus lainnya mengenyam pendidikan di 2.326 Sekolah Luar Biasa (SLB)(Arifa, 2024).

Menurut data statistik pendidikan Kemendikbudristek tahun 2023, kumulatif nasional anak putus sekolah tingkat SD sebanyak 40.623 anak dan tingkat SMP sebanyak 13.716 anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebut jumlah anak putus sekolah di Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi kedua secara nasional, dengan jumlah 3.509 anak pada tahun 2023 yang mencakup Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten/kota terbanyak anak putus sekolah tingkat SD/SMP. Salah satu faktor terbesar anak putus sekolah yakni karena disabilitas. Menurut data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi secara nasional masih ada 67% anak penyandang disabilitas yang belum terlayani atau belum memperoleh akses pendidikan yang layak. Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan adalah salah satu HAM yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional.

Di sisi lain, meskipun sekolah inklusif mengalami peningkatan jumlah, akan tetapi penyelenggaraannya masih belum optimal. Budaya inklusif di sekolah inklusif belum berjalan dengan baik (Arifa, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdausyi (2024) mengemukakan bahwa banyak guru yang kurang terampil dan minimnya pengetahuan menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga hal ini mengganggu pelayanan pendidikan. Selain itu, terdapat kendala berupa fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Tanpa fasilitas tersebut, siswa dengan kebutuhan khusus menjadi sulit untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Hambatan lain berupa stigma sosial, menurut penelitian Mustaqmin (2024) menunjukkan adanya diskriminasi akibat stigma yang berkembang dimasyarakat mengenai anak-anak berekebutuhan khusus. Oleh karena itu,

diperlukan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan berbeda (Supriyadi & Rohmat, 2019).

Tetapi itu semua tidak lepas dari hambatan dalam pendanaan yang dimana pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sekolah dengan pendidikan inklusif tentu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Biaya tersebut dibutuhkan sekolah untuk keperluan pengadaan sarana-prasarana, honor para guru dan biaya operasional lainnya (Alfaaroqi & Khoiruddin, 2020).

Dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pembelajaran inklusif, kesiapan sekolah memegang peranan yang sangat krusial. Kesiapan tersebut melibatkan berbagai unsur, seperti penyiapan tenaga pengajar, penyesuaian kurikulum, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, serta dukungan dari manajemen sekolah. Tanpa kesiapan yang memadai, upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif mungkin tidak akan berhasil. Beberapa aspek kunci dari pembelajaran inklusif antara lain kesiapan siswa di SMA Negeri Medan, kesiapan tersebut mencakup peserta didik berkebutuhan khusus dan teman sebayanya yang tidak berkebutuhan khusus. Kesiapan siswa pada konteks pendidikan inklusif melibatkan pemahaman tentang keberagaman, sikap inklusif, keterampilan sosial, serta kesiapan untuk menerima dan membantu satu sama lain. Selain itu, kesiapan guru menjadi faktor penting; guru memegang kunci dalam penyelenggaraan pendekatan pembelajaran inklusif. Kesiapan guru di SMA Kota Medan mencakup pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu siswa, kemampuan merancang strategi pembelajaran yang disesuaikan, serta keterampilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi

seluruh siswa. Kesiapan sarana prasarana disekolah juga tidak kalah pentingnya; sarana fisik dan nonfisik di SMA Medan mempunyai peranan yang krusial dalam mendukung pendidikan inklusif. Hal ini meliputi aksesibilitas sarana, tersedianya ruangan khusus, dukungan tenaga medis dan psikologis, serta penyediaan alat pendukung dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Terakhir, kesiapan kurikulum: kurikulum menjadi dasar utama dalam merancang pembelajaran inklusif di SMA di Medan. Kesiapan kurikulum ini meliputi penyiapan materi yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik, pengembangan metode evaluasi yang inklusif, serta pengintegritasan nilai-nilai keberagaman dan toleransi dalam setiap aspek pembelajarn. Kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran inklusif juga meliputi penerapan sikap inklusif dan budaya yang mendukung di seluruh lingkungan sekolah. Sikap yang positif terhadap keberagaman dan kebutuhan peserta didik yang beragam sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan untuk penelitian ini, yang pertama meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurochmi Vitasari dan Sri Tuter Martaningsih pada tahun 2018 yang berjudul “Kesiapan Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian menganalisis tingkat kesiapan sekolah berdasakarn 8 aspek kesiapan pengimplementasian pendidikan inklusif yaitu, aspek kurikulum, pendanaan, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasana, sumber daya manusia, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar. Persamaan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan instrumen angket dan teknik analisis data menggunakan

statistik deskriptif dan penyajian data dengan menggunakan persentase. Perbedaannya adalah lokasi penelitian.

Kedua Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mia Leksmiani, dkk pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya proses pelaksanaan, tantangan, dan faktor pendukungnya. Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dideskripsikan pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif. Hal ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kesiapan sekolah terutama tingkat SMA dan menjadi bahan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Maka sangat diperlukan penelitian yang berjudul “Kesiapan Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi Bagi ABK Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Medan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kesiapan sekolah yang masih kurang dalam mencakup delapan aspek utama dalam implementasi pendidikan inklusif.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif di kalangan peserta didik, orangtua, dan masyarakat.

3. Kurang terampil dan minimnya pengetahuan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus.
4. Terdapat kendala berupa fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada penelitian dan lebih terfokus pada suatu pencapaian penelitian. Maka dibatasi permasalahan penelitian pada: “Kesiapan Sekolah dalam menerapkan pendidikan Inklusi bagi abk tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Medan”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu: “Bagaimana gambaran kesiapan sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Medan?”.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu untuk: Mengetahui gambaran kesiapan sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi pada Sekolah Menengah Atas di Kota Medan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan khususnya mengenai penerapan pendidikan inklusi bagi Abk di sekolah pada bidang bimbingan dan konseling.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi serta khasana keilmuan khususnya dalam menerapkan pendidikan inklusi bagi Abk di sekolah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Sekolah

Bagi pihak sekolah, penelitian ini memberikan panduan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka terkait kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

#### b. Bagi Dosen

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperkaya literatur terkait pendidikan inklusi, terutama dalam konteks kesiapan sekolah menengah atas. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang materi pengajaran yang relevan, terutama dalam bidang pendidikan inklusi.

#### c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menjadi wawasan praktis kepada mahasiswa, terutama mereka yang sedang mempelajari pendidikan inklusi atau pendidikan khusus. Mahasiswa juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam menyusun tugas akhir atau penelitian lanjutan.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai kesiapan sekolah menengah atas dalam menerapkan pendidikan inklusi. Temuan dalam penelitian dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan sosialisasi mengenai pentingnya inklusi di sekolah.

